



**PUTUSAN**

Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 29 tahun, tempat dan tanggal lahir  
Xxxxxxx, 02 Juli 1991, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan  
Honorer Kejaksaan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman  
di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten  
Morowali Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 30 tahun, tempat dan tanggal lahir  
Kolonodale, 01 November 1990, Agama Islam, Pendidikan  
SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa  
Kolonodale, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali  
Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September  
2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku tanggal 21

**Hlm 1 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dengan register perkara Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 November 2011 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kolonodale;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 3.1. Anak pertama, (Perempuan) umur 7 tahun;
  - 3.2. Anak kedua (Laki-Laki) umur 3 tahun;
4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2. Bahwa sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:
    - 5.2.1. Tergugat sering berkata kasar bahkan pernah memukul Penggugat;
    - 5.2.2. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
    - 5.2.3. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

**Hlm 2 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya yakni sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang dan sejak saat itu pula Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 1 Oktober 2020 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat telah tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 22 September 2020

**Hlm 3 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 Oktober 2020 yang relas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** (Penggugat), NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara tertanggal 21 September 2017 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 November 2011, atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

## B. Saksi-Saksi;

1. **Saksi Pertama (Saksi I)**; umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx Xxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Hlm 4 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah awalnya mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxx kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kolonodale, kemudian sudah 4 bulan terakhir sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga mereka dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak **Desember 2013** sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1x;
- Bahwa saksi selain itu sering mendengar Tergugat bertengkar melalui adu mulut yang tak kunjung berhenti namun tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa saksi selain itu sering mendengar orang tua Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan dan Tergugat memiliki sikap temperamental;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan **Mei 2020** dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama (+-) 4 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama dikarenakan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena

**Hlm 5 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

2. **Saksi kedua (Saksi II);** umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Morowali Utara di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu 1x Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah awalnya mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxx kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kolonodale, kemudian sudah 4 bulan terakhir sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga mereka dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak **Desember 2013** sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar curhatan Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat namun tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui curhatan Penggugat dikarenakan Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan **Mei 2020** dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama (+-) 4 bulan;

**Hlm 6 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama dikarenakan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 8 Oktober 2020 yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relass) tertanggal 22 September 2020 dan 2 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

**Hlm 7 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat sering berkata kasar bahkan pernah memukul Penggugat, Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak serta antara keduanya sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan dan keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi bernama

**Hlm 8 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Betrius Mapede bin Mapede (Saksi I) dan Masdarayati Retea binti Jumara (Saksi II);**

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 November 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 November 2011, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut termasuk akta otentik. Selain itu, suatu perceraian dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

**Hlm 9 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga dengan adanya bukti (P-2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang sekaligus berfungsi sebagai *probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti), Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kedua bukti surat *a quo* tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **Betrius Mapede bin Mapede (Saksi I)** dan **Masdarayati Retea binti Jumara (Saksi II)** keduanya merupakan Paman dan Sepupu 1x Penggugat karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa perceraian berdasarkan alasan pertengkaran/perselisihan (*syiqaaq*) harus didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan suami istri;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan **Betrius Mapede bin Mapede (Saksi I)** Penggugat menerangkan bahwa sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak 1x. Saksi menerangkan bahwa apa yang

**Hlm 10 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihatnya merupakan pertengkaran dipicu karena Tergugat sering memukul Penggugat. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa saksi sering mendengar orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Diterangkan oleh saksi bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, penyampaian keluhan kesah Penggugat diceritakan pada setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran. Apa yang dilihat dan didengar saksi merupakan kejadian yang berulang-ulang sehingga menyebabkan pertengkaran hal mana karena keduanya tidak ada komunikasi yang terjalin yang berujung pada perginya Penggugat dari kediaman bersama. Diterangkan pula oleh saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Penggugat yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri, saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat bersama Tergugat dalam tenggang waktu tersebut karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama rentang waktu tersebut karena diusir oleh Tergugat serta saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **Masdarayati Retea binti Jumara (Saksi II)** Penggugat menerangkan bahwa sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi menerangkan bahwa apa yang didengarnya merupakan pertengkaran dan cekcok yang dipicu karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa saksi sering mendengar Tergugat memukul Penggugat. Apa yang dilihat saksi merupakan kejadian yang berulang-ulang terjadi karena keduanya tidak ada komunikasi yang terjalin yang berujung pada perginya Penggugat dari kediaman bersama. Penyampaian keluhan kesah Penggugat diceritakan pada setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran. Diterangkan pula oleh saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan

**Hlm 11 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada diri dan keseharian Penggugat yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri, saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat bersama Tergugat dalam tenggang waktu tersebut karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama selama rentang waktu tersebut karena diusir oleh Tergugat serta saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karena dilihat sendiri, didengar sendiri dan dirasakan sendiri sehingga dalil gugatan Penggugat relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 November 2011 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak **Desember 2013** yang lalu keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut antara lain karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan **Mei 2020** Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;

**Hlm 12 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 4 bulan sehingga rumah tangga dan hubungan Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah dan senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya menambah penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar daripada maslahatnya sehingga Majelis berpendapat hubungan keduanya harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 November 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 November 2011, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam perkara ini

**Hlm 13 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memiliki kapasitas sebagai *persona stand in judicio*, oleh karena itu Penggugat memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

- Bahwa Tergugat sering memukul dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, serta keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi kaidah hukum Islam dalam kaidah fiqh Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Juz II halaman 82 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "Di saat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَكْبَرُهَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

**Hlm 14 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. PP No. 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

**Hlm 15 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan di Bunku pada hari **Kamis** tanggal **8 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Safar 1442 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Slamet Widodo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Fauzi Prihastama, S.Sy.,**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Hlm 16 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Saifudin, S.Sy.,

Derry Briantono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Slamet Widodo, S.H.,

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Proses .....	Rp. 65.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 900.000,-
4. PNBP .....	Rp. 20.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 1.031.000,-

(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah)

**Hlm 17 dari 17 Hlm Putusan Nomor: 309/Pdt.G/2020/PA.Buk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)